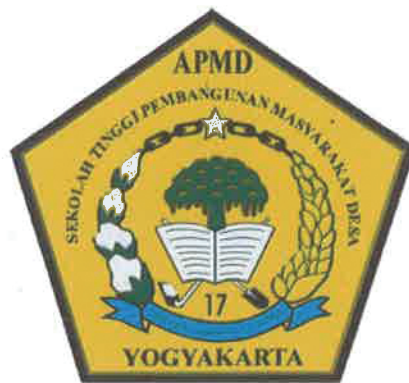


SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEKTOR
PERTANIAN DESA DI KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI
KABUPATEN SLEMAN



Diajukan Oleh:

LUDOVIKUS ALDIANO JEBARUS

19520091



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2024

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEKTOR
PERTANIAN DESA DI KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI
KABUPATEN SLEMAN**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Januari 2024

Waktu : 09.00-10.30

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si
Ketua Penguji/pembimbing

Analius Giawa, S.IP., M.Si
Penguji samping I

Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si
Penguji samping II

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa

SURAT PERNYATAAN KEASLIHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ludovikus Aldiano Jebarus

NIM : 19520091

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Mengatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEKTOR PERTANIAN DESA DI KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN”** ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, telah di sebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Ludovikus Aldiano Jebarus

MOTTO

"Hidup adalah perjalanan yang harus dijalani, bukan masalah yang harus ditakuti."

**"Tuhan, jika aku menghilang, tolong beritahu orang-orang bahwa aku mengejar Iblis,
mencoba mendapatkan jiwaku kembali."**

"ALDY"

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan berkat serta kasih setia-Nya, sehinggalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEKTOR PERTANIAN DESA DI KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN”** dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S.IP pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadarinya sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta;
3. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang baik hati dalam membimbing, dan memberikan masukan-masukan serta nasehat yang sangat memotivasi dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Staf Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
5. Seluruh Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberi ijin dan meluangkan waktu untuk melakukan penelitian;

6. Bapak Servasius Jebarus dan Ibu Getrudis Just selaku orang tua tercinta yang selalu mendukung, menyemangati dan selalu mendoakan saya selama masa Pendidikan;
7. Valerie Etriana Jebarus selaku adik saya tersayang yang selalu memotivasi saya untuk cepat-cepat menyelesaikan masa pendidikan ini;
8. Pihak lainnya, sahabat, dan teman-teman seperjuangan yang tidak disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu dibutuhkan segala kritik dan saran yang proporsional dan bertanggung jawab demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kalangan akademis, praktisi, organisasi, dan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Mahas Esa, karena telah memberikan kesehatan, rahmat dan berkat serta kasih Karunia-Nya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga sudah sampai dititik ini, hingga akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu mendengarkan doa-doa yang saya panjatkan.
2. Bapak Servasius Jebarus dan Ibu Getrudis Just selaku orang tua yang saya sayangi. Terima Kasih untuk cinta yang telah kalian berikan pada saya, karena cinta kalian aku bisa hidup di dunia ini. Kelak saya akan dan harus merawat ayah ibu dengan cinta ini. Semoga kalian selalu bersama dan tetap terus bersama sampai waktu yang di tentukan-NYA akan tiba.
3. Adik saya Valerie Etriana Jebarus yang telah membantu baik dari segi finansial, nasihat, serta motivasi. Di usia yang jauh berbeda kamu di paksakan untuk dewasa. Trimakasih atas segala hal yang telah kau berikan untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Adik Petrus Brian Padar dan Kaka Toni Ampur, trimakasih sudah meluangkan waktunya untuk menemani saya dalam penelitian di Kalurahan Wonokerto.
5. Keluarga besar yang selalu mendukung saya, yang tidak bisa sebutkan satu persatu.
6. Untuk Agresiana Sonia Dahing trimakasih selalu menemani saya dalam pengerjaan skripsi ini dari awal sampai selesai.

7. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Pembimbing saya, yang telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Saya bersyukur mendapatkan bimbingannya, trimakasih atas baikan ibu semoga selalu
8. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu dan pendidikan akademik selama saya menempuh studi di kampus tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta.
9. Staf Kampus yang sudah melayani saya dengan baik selama saya menempuh pendidikan di Kampus STPMD “APMD” Yogyakarta.
10. Teman-teman Kost Gorongan 199A yang selalu menghibur saya di kala saya pusing mengerjakan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
INTISARI	xiv
Bookmark not defined.	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat praktis	6

F. Literatur Review	6
G. Kerangka Konseptual.....	18
1. Konsep Governing (Perbuatan Memerintah).....	18
2. Konsep Impelementasi Kebijakan	21
3. Konsep Pembangunan Desa	26
4. Konsep Pembangunan Infrastruktur Desa	30
H. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Unit Analisis	33
3. Teknik pengumpulan Data.....	34
4. Teknik Analisis Data.....	38
BAB II PROFIL KALURAHAN WONOKERTO.....	41
A. Sejarah Kalurahan Wonokerto	41
B. Geografis Desa.....	42
C. Demografi Desa.....	44
D. Kondisi Fisik Wilayah	48
E. Kondisi sosial, Ekonomi dan Budaya.....	49
F. Struktur Organisasi pemerintah Kalurahan Wonokerto.....	57
G. Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan	64
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	67

A. Komunikasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Guna Mendukung Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Desa.....	68
B. Sumber Daya Implementasi kebijakan Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian	75
C. Disposisi Implementasi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	82
D. Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Wonokerto.....	88
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	93
DAFTAR PUSTAKA.....	97
PEDOMAN WAWANCARA	99
DOKUMENTASI	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan	35
Tabel 2.2 Wilayah Padukuahan, RT dan RW Kalurahan Wonokerto	45
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin	46
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Pendidikan	47
Tabel 2.5 Jumlah penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	48
Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Eksisting Kalurahan Wonokerto	49
Tabel 2.7 Jumlah organisasi kemasyarakatan	50
Tabel 2.8 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan Wonokerto	53
Tabel 2.9 Sebaran Fasilitas Ekonomi Kalurahan Wonokerto	54
Tabel 2.10 Jenis Kegiatan Budaya Kalurahan Wonokerto	57
Tabel 2.11 Jenis bidang pembangunan Kalurahan Wonokerto tahun 2022- 2027.....	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Sturuktur Pemerintahan Kalurahan Wonokerto	5
---	----------

INTISARI

Di Kalurahan Wonokerto pembangunan infrastruktur memegang peranan yang sangat penting dalam kelangsungan aktivitas penduduk. Hal ini dilihat dari mata pencaharian masyarakat wonokerto yang mayoritas petani. Kalurahan Wonokerto memiliki 150 hektar lahan pertanian yang bergantung pada saluran irigasi. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur demi menunjang kebutuhan masyarakat. Akan tetapi pada kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto belum bisa menutupi persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat. Penggunaan prespektif governing dalam penelitian ini mengarah pada fungsi pemerintahan dan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Wonokerto.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini berjumlah 9 narasumber yang terdiri dari Lurah Wonokerto, carik, BPKal Wonokerto, Ketua Kaur Pembangunan, Ketua Kaur Perencanaan, Ketua LPMKal Wonokerto, Kepala Dukuh (2 orang) dan Ketua Kelompok Tani Kalurahan Wonokerto. Subjek penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Wonokerto dapat diukur dari empat indikator menurut George C. Edward III yaitu *Komunikasi*, penyampaian informasi kebijakan pembangunan secara sistematis dan terstruktur. Namun pencapaian tujuan tersebut belum mencapai hasil yang baik karena masih banyak masyarakat yang belum memahami informasi kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kalurahan. Kedua, sumber daya di Kalurahan Wonokerto, baik manusia maupun non-manusia, masih kurang atau tidak mencukupi. Ketiga adalah *Disposisi*, yaitu Implementor melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan. Untuk menghargai kinerja para Implementor, Pemerintah memberikan insentif kepada para implementor dengan memberikan bonus tambahan selain gaji. Keempat, *struktur birokrasi* Kalurahan Wonokerto terorganisir dengan baik karena mempunyai mekanisme yang jelas dalam bekerja dan dipertanggungjawabkan oleh implementor sesuai SOP. Indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Wonokerto berjalan dengan lancar, dan dilihat dari SOP berupa petunjuk teknis, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pembangunan Infrastruktur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan negara saat ini ditopang oleh faktor Pembangunan Daerah, atau Indonesia dibangun dari Desa, karena kemajuan desa sangat mempengaruhi kemajuan perekonomian Indonesia. Era reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk terus mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah serta mensejahterakan masyarakat. Menurut Undang-Undang desa no 6 tahun 2014 bahwa pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu pembangunan infrastruktur desa adalah irigasi pertanian. Dalam hal ini perlunya ada implementasi dari pemerintah desa untuk menjalankan amanah dari undang-undang desa no 6 tahun 2014.

Pembangunan infrastruktur merupakan semua fasilitas, entah itu fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pihak pemerintah atau perorangan guna memenuhi keperluan dasar masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur dilandasi oleh pemabangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Negara Indonesia memiliki dua jenis pembagian wilayah di antaranya wilayah perkotaan dan pedesaan. Pembangunan merupakan proses untuk mewujudkan cita-cita bernegara yaitu menuju masyarakat yang makmur sejahtera

secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk mengatasi persoalan yang ada pada masyarakat. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa.

Infrastruktur memegang peranan yang sangat penting dalam kelangsungan aktivitas penduduk di suatu wilayah. Aktivitas penduduk dapat tertampung pada fasilitas sosial dan ekonomi, namun tidak dapat berjalan lancar tanpa dukungan pelayanan infrastruktur yang memadai. Misalnya kegiatan perekonomian penduduk suatu daerah dapat terakomodasi dalam bentuk fasilitas perekonomian pada ruang-ruang seperti kawasan, perdagangan, jasa, dan industri yang dimiliki daerah tersebut, namun tidak didukung oleh jaringan infrastruktur yang baik, seperti jaringan jalan raya. Kegiatan air bersih, pembuangan limbah, drainase dan sanitasi tidak berfungsi secara optimal. Kegiatan perekonomian suatu wilayah apabila didukung dengan pelayanan infrastruktur yang baik dapat mendorong peningkatan intensitas dan kualitas kegiatan tersebut sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Button, 2002 dan Hadi Wahyono, 2006).

Pemerintahan desa merupakan suatu lembaga pemerintahan otonom yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang mengurus pemerintahan tingkat desa dan mempunyai pemerintahan sendiri, sehingga menjadikan jati diri desa sebagai landasan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan menyentuh kehidupan masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur dengan partisipasi penuh masyarakat lokal pada setiap tahapannya (tahap perencanaan hingga pengoperasian dan pemeliharaan). Melibatkan masyarakat pedesaan dalam pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak ganda, antara lain (1) kualitas pekerjaan yang dihasilkan,

(2) keberlanjutan operasional dan pemeliharaan infrastruktur, (3) kemampuan masyarakat dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak, dan (4) Kapasitas penguatan: Masyarakat mampu secara mandiri memajukan kegiatan masyarakat di wilayahnya.

Penduduk pedesaan merupakan sumber daya manusia yang potensial dan mempunyai peran ganda, yaitu sebagai objek pembangunan sekaligus subjek pembangunan. Alasan mengapa dikatakan sebagai isu pembangunan adalah karena sebagian warga desa masih perlu diberdayakan dari segi kualitas. Di sisi lain, masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai aktor dalam proses pembangunan.

Sebagai gambaran awal, bahwa Kalurahan Wonokerto merupakan salah satu Kalurahan yang terletak di kaki/lereng Gunung Merapi, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Yogyakarta. Secara geografis, Kecamatan Wonokerto terletak pada ketinggian antara 400 hingga 900 meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian ini, sebagian besar wilayahnya merupakan pertanian. Curah hujan tahunan rata-rata adalah 3.908 mm dan suhu berkisar antara 24°C hingga 28°C. Air tanah yang mengalir di bawah permukaan berasal dari jalur mata air Turi-Sleman dan digunakan untuk air bersih dan irigasi pertanian. Namun, pada musim kemarau, beberapa daerah kekurangan air untuk pertanian. Kalurahan Wonokerto mempunyai lahan pertanian yang luas dan salak Pondoh merupakan salah satu komoditas unggulan di Kalurahan Wonokerto. Oleh karena itu keberadaan saluran irigasi sangat penting terutama pada musim kemarau. Menurut informasi dari Kalurahan Wonokerto, 150 hektar lahan pertanian bergantung pada saluran irigasi (<https://sidewo.id/profile>).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep Governing (perbuatan pemerintah) untuk mempelajari perbuatan pemerintah yang memerintah berdasarkan

fungsi dan kebijakannya dalam mengatur dan mengurus. Penggunaan prespektif governing dalam penelitian ini mengarah pada fungsi pemerintahan dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan infarastruktur.

Saat ini Pemerintah Kalurahan Wonokerto masih berupaya untuk mengatasi persoalan yang sering di alami para petani seperti halnya pada pembangunan irigasi pertanian. Langkah awal yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Wonokerto dengan menyediakan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar 428.266.000, dana ini dikucurkan melalui APBKal Wonokerto tahun 2022. Kebutuhan irigasi sangat di perlukan untuk kebutuhan masyarakat sebagai penunjang di sektor pertanian.

Menilai keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan dapat diukur dari sudut pandang kemampuan pemerintah dalam melanjutkan dan melaksanakan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan implementasi kebijakan yang sebenarnya, secara otomatis mempunyai jaminan implementasi program yang baik. Pentingnya pendekatan pemerintah dengan masyarakat terlebih khusus para petani di Kalurahan Wonokerto untuk mengetahui langsung persolan yang ada dilapangan. Melalui Peraturan Kalurahan Wonokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah Kalurahan dan BPKal, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan, serta penguatan masyarakat Kalurahan. Disamping itu, pembangunan infrastruktur diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota.

Berangkat dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Sektor Pertanian Di Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman”**

B. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian ini penulis akan menjelaskan;

1. Implementasi Kebijakan Pembangunan infrastruktur transportasi guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa.
2. Implementasi kebijakan Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian.
3. Implementasi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Wonokerto?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pembangunan infrastruktur di Kalurahan Wonokerto, dalam mengatasi masalah yang di alami para petani.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca tentang Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dari aspek kebutuhan dan pemanfaatan pembangunan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi baru terhadap penggunaan teori dengan temuan penelitian.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kebijakan tambahan bagi calon peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama.

F. Literatur Review

Pada dasarnya penelitian tentang implementasi Pembangunan Infrastruktur bukanlah sebuah penelitian yang baru. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini, diantaranya;

Penelitian pertama oleh Arya Bagus Pramudyansyah & Badrudin Kurniawan dari Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Surabaya tentang Implementasi Kebijakan program kebijakan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI) Pembangunan Infrastruktur di Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Volume 11 No 4 tahun 2023. Tulisan ini bersisi tentang Implementasi Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan sangat penting dilakukan mengingat kondisi masyarakat Desa Jatidrojog yang rata-rata berkerja sebagai petani. terkait program P3TGAI dilakukan setiap tahun akan mengingat pentingnya kebersihan irigasi yang ada di wilayah pertanian, setiap waktu pelaksanaan pihak pemerintah Desa selalu mengajak masyarakat dalam Musrenbangdes dimana forum tersebut merupakan sarana untuk menampung aspirasi masyarakat, di dalam

pelaksanaan program P3TGAI Desa Jatidrojog saat ini sebenarnya sudah mendapat dukungan dari petani, hal tersebut dibuktikan dengan antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan.

Pada Program P3TGAI Pemerintah Desa Jatidrojog membentuk TPM tim pemandu masyarakat terkait dengan monitoring dan evaluasi program, dimana tim tersebut terdiri atas perangkat desa dan masyarakat desa yang sebelumnya sudah dipilih. Selain itu dalam proses pelaksanaan dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Dinas Bina Marga, masyarakat desa Jati Drojog Berharap akan pemantauan yang dilakukan pihak Kecamatan serta Dinas Bina Marga terkait dengan pelaksanaan Program P3TGAI agar pihak dinas terkait dapat mengetahui betul permasalahan yang dialami masyarakat desa, selain itu kegiatan semacam pemantauan sangat penting karena dirasa dapat membantu menampung aspirasi masyarakat agar nantinya dapat menciptakan sinergi yang luar biasa dalam proses pelaksanaan. Jika komunikasi antar petinggi dan masyarakat baik maka dapat dipastikan program tersebut akan berjalan dengan baik. terkait dengan pelaksanaan program P3TGAI yang sedang dilaksanakan di Desa Jatidrojog Masyarakat Desa sangat mendukung karena melihat kondisi demografis program tersebut dirasa cocok apabila di terapkan. namun masih terdapat kendala yakni masih banyak menumpuk yang diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan menjaga lingkungan sekitar, selain itu masih banyak truk dari luar yang membuang sampah ke area persawahan warga, dari kejadian tersebut menimbulkan efek yang sangat besar dan jangka panjang yakni pada saat musim penghujan tiba debit air naik sehingga masuk ke area persawahan dan rumah rumah warga, selain itu masih ada permasalahan lain yakni kurang meratanya pembangunan P3TGAI yang ada di area persawahan warga, untuk saat ini pembangunan dirasa masih setengah dan kurang mencakup area persawahan warga.

Oleh karena itu masih banyak warga yang mengeluhkan keadaan tersebut dan mereka berharap Pemerintah Desa agar segera menyelesaikan pembangunan agar proses pengairan dapat berjalan dengan baik. Harapan masyarakat Desa Jatidrojog terkait dengan pelaksanaan program P3TGAI diadakan setiap tahun karena merasa sangat terbantu dengan adanya program. Karena jika perairan mereka lancar maka kegiatan pertanian mereka juga nantinya akan berjalan lancar sehingga ketahanan pangan meningkat, hal tersebut tentunya disikapi dengan baik oleh Pemerintah Desa Jatidrojog selaku pemangku kebijakan, tentunya hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi Pemerintah Desa Jatidrojog apakah sudah dapat menjalankan sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu pemerintah desa dan masyarakat dapat bahu membahu dan saling bersinergi agar program tersebut bisa dikatakan berhasil.

Penelitian kedua, oleh Wahyu Kurniawan & Karjuni Dt. Maani dari Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JIMP) tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. Volume 1 nomor 4 tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah sesuai dengan ciri-ciri organisasi eksekutif menurut Donald van Meter dan Karl van Hoed, organisasi eksekutif harus bersifat demokratis dan persuasif dalam melaksanakan kebijakan. Demokrasi disini maksudnya adalah dalam proses implementasi kebijakan, lembaga eksekutif sebagai wakil masyarakat dapat melaksanakan dengan baik kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Tabir Selatan sesuai dengan standar, maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Sedangkan persuasif disini maksudnya adalah pihak pelaksana harus mampu meyakinkan masyarakat dan perusahaan untuk menjaga kondisi jalan dan tetap dalam kondisi baik.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Jalan Tabir Selatan telah berhasil dilaksanakan melalui model Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Pembangunan jalan sepanjang 9,3 km yang menghubungkan Desa Muara Delang-Gading Jaya hampir selesai. Alangkah baiknya jika pembangunan ini dilanjutkan ke perkotaan.

Penelitian ketiga oleh Yanhar Jamaluddin & Rizqy Aqilla Haya Br Sinaga dari Jurnal Ajudan Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara tentang Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021. Volume 1 nomor 1 tahun 2023. Hasil dari penelitian ini bahwa, Keberhasilan Implementasi Program Pembangunan Jalan di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 sebagaimana dilihat dari perspektif hasil: belum membawa manfaat kepada semua masyarakat Desa Ujung Rambe. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 9 responden, peneliti menyimpulkan bahwa 4 responden menilai aparat pemerintah desa melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2021, sedangkan 5 responden lainnya menyatakan aparat pemerintah desa tidak berhasil melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2021. Pembangunan Infrastruktur Jalan 2021. Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jalan tahun 2021 di desa Ujung Rambe, kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Delishadang, dilihat dari hasilnya: tidak membawa manfaat bagi seluruh masyarakat desa Ujung Rambe.

Penelitian ke empat oleh Indra A. Pantow, Sofia Pangemanan & Ventje Kasenda dari Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Pemerintahan (FISIPOL UNSRAT) tentang Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat, Studi Di Desa Tempok Selatan Kecamatan

Tompaso Kabupaten Minahasa. Volume 1 nomor 1 tahun 2019. Dari keterangan penulis mengatakan bahwa:

1. Secara keseluruhan pengembangan Desa Tempok sudah sesuai. Namun pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan, dilihat dari pelaksanaan pada tahun anggaran 2016 masih terdapat beberapa kendala, namun dapat berjalan dengan baik.
2. Fokus pada pembangunan jalan sebagai sarana transportasi darat yang digunakan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Hal ini selaras dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan juga belum maksimal.
3. Seluruh pembangunan dilakukan pada tahun anggaran 2016, namun fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur. Implementasi partisipasi masyarakat pada tahap ini masih kurang, dan hanya sebagian masyarakat peserta yang melakukan kegiatan pembangunan dengan memberikan kompensasi.
4. Faktor penghambat pembangunan infrastruktur di Desa Tempok Selatan adalah kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, belum lagi kurangnya lahan dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, hanya sebagian masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Penelitian kelima, oleh Yulianti, Abdul Kahar & Jurana dari Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia tentang Praktik Good Governance Dana Desa Dalam pembangunan Infrastruktur, studi di Desa Tanauge Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara. Volume 1 nomor 2 tahun 2023. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai praktik Good Governance dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Tanauge Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Desa Tanauge telah menerapkan tata kelola pembangunan infrastruktur yang baik, dengan pertanggungjawaban formal atas infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran desa, yang memuat ketentuan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh kepala desa.
2. Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan partisipatif pembangunan infrastruktur di Desa Tanauge tidak mampu membangkitkan komitmen dan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bentuk kegiatan program APBDES karena adanya pembatasan sepihak yang dilakukan oleh kepala desa.
3. Akuntabilitas formal dan terbatasnya partisipasi, selain gagal mewujudkan tata pemerintahan yang baik, juga dapat memicu perilaku disfungsional (abnormal) para pengambil keputusan (kepala desa), yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

Penelitian keenam, oleh Heppy Sondakh, Michael Mantiri & Ventje Kasenda dari Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan UNSRAT. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Volume 1 nomor 1 tahun 2021. Hasil dari penelitian ini bahwa:

1. Dalam hal ini peran serta masyarakat aparat Desa Tondei dalam proses pembangunan hanya sebatas pengaduan, ada pula yang terlibat dalam pembangunan, dengan kata lain masyarakat ikut serta pada saat proses pembangunan sudah dimulai atau bahkan telah selesai, namun pada saat tahap pemantauan kemajuan pembangunan, keterlibatan masyarakat belum banyak sehingga pengaduan masyarakat dapat tergolong terlambat.
2. Kebijakan tidak langsung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tondei sudah baik, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencapai

akuntabilitas dan komprehensif. Implikasi dari akuntabilitas disini adalah segala kegiatan yang diserahkan kepada masyarakat harus dilaksanakan pada saat proses pelaksanaan, dan akan ada beberapa kendala yang timbul karena adanya perbedaan pemahaman dan cara pandang masyarakat terhadap proses pembangunan yang akan dilaksanakan.

3. Kebijakan hybrid merupakan kebijakan yang memberikan peluang atau peran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pembangunan Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan, upaya yang dilakukan antara lain Partisipasi, dimana pemerintah desa mengajak masyarakat untuk ikut serta secara langsung dalam perencanaan pembangunan, pengerjaan dan pemeliharaan Desa Tondei, dimana pemerintah desa memberikan informasi terkait Perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Terpampang di papan pengumuman Kantor Desa Tongdi, kesetaraan dan keadilan, pemerintah memberikan peluang pembangunan di setiap titik di Desa Tongdi untuk memajukan transportasi perekonomian desa.

Penelitian ketujuh, oleh Anisa Cikal Febrianti, Abubakar Iskandar & Rusliandy dari Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Infastruktur Melalui Program Samisade Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Ciawi. Volume 10 nomor 2 tahun 2023. Hasil dari penelitian ini bahwa, Pada tahun 2021, implementasi kebijakan pembangunan melalui program SAMISADE telah mencapai 99% pembangunan infrastruktur selesai berdasarkan proposal yang diajukan oleh desa. Namun dari segi pengawasan, SAMISADE pada tahun 2021 masih kurang atau bahkan tidak ada pengawasan sama sekali. Dari sisi rencana peraturan yang akan diterapkan pada tahun 2021, pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada saat ini dinilai masih

belum konsisten. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ciawi terdiri dari 13 desa yang semuanya telah melaksanakan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan desa, dengan total 20 lokasi pembangunan. Karena kontur tanah Kabupaten Ciawi yang banyak terdiri dari tebing, maka dana hasil pembangunan SAMISADE lebih banyak terserap untuk pembangunan tembok penahan tanah (TPT) untuk menstabilkan kondisi lahan di atas tebing tersebut.

Pengawasan proyek SAMISADE di Distrik Chiavi akan dimulai pada tahun 2021, sesuai dengan peraturan yang ada jika terjadi kendala pada saat penyelesaian kegiatan pembayaran dan pengembangan tahap kedua. Dari hasil pengolahan 99 kuesioner, diperoleh skor indeks kepuasan masyarakat (IKM) kuesioner ini sebesar 91,23 sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja unit pelayanan ini ditinjau dari kualitas pelayanan A tergolong sangat baik karena dinilai pada rentang konversi dari indeks kepuasan masyarakat sebesar 88,31 -100,00. Elemen dengan nilai (NRR) tertinggi adalah Spesifikasi Produk, Jenis Layanan (mean 3,737). Yang terendah pada penanganan pengaduan, saran dan komentar (rata-rata 3.535).

Signifikansi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa perencanaan memegang peranan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, sehingga memungkinkan adanya perhitungan yang cermat terhadap implementasi kebijakan. Selain itu, agar kebijakan tersebut dapat berjalan, perlu adanya perhatian yang lebih besar terhadap peraturan yang ada dibandingkan melakukan terlalu banyak perubahan terhadap peraturan agar tidak sering terjadi permasalahan teknis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berdampak pada kebijakan pembangunan infrastruktur pada program SAMISADE (a) Sosialisasi pelaksanaan program SAMISADE sebaiknya diberikan secara berkala agar kesalahan dapat diminimalisir. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan daerah dan pedoman

operasional dan teknis, kesalahan pengelolaan dan kesalahan lainnya masih terjadi di masyarakat. (b) Tim Verifikasi Kecamatan Chavi dan UPT PUPR memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta melakukan koordinasi antara Tim Verifikasi dan Pendamping Desa dalam pelaksanaan SAMISADE. (c) Desa penerima bantuan program SAMISADE harus memastikan bahwa mereka mempunyai tenaga ahli atau konsultan perencana dan konsultan pengawas, hal ini untuk memastikan tidak terjadi kesalahan konstruksi di kemudian hari sehingga menimbulkan kerusakan material dan memerlukan pengerjaan ulang.

Rekomendasi dari temuan studi ini adalah: (1) Desa-desa penerima dana SAMISADE sebaiknya memulai dengan memiliki konsultan perencanaan dan konsultan pengawas untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam peraturan Bupati agar dapat lebih mengawasi pekerjaan pembangunan proyek SAMISADE dan untuk mengevaluasi dan mengevaluasi kasus-kasus masa lalu. (2) Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara tim verifikasi dan tim pelaksanaan kegiatan. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, (3) perlu diungkapkan kepada masyarakat dana apa saja yang diterima desa yang berguna untuk pembangunan masyarakat, (4) disarankan agar dilakukan penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel selain kepuasan masyarakat, dan disarankan agar penelitian pada bidang ini diperluas menjadi Penelitian ini tetap dapat dilakukan dalam jangka panjang pada program pemerintah sejenis yang menggunakan anggaran besar.

Penelitian kedelapan, oleh Amiral Amra Opransiski & Dadang Mashur dari Jurnal *Publicuho a peer reviewed and open access journal* tentang Implementasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desabidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Igal Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021. Volume 6 nomor 3 tahun 2023. Hasil penelitian ini bahwa, Setelah mempelajari APBD dan mengacu

pada hasil rapat pengkajian, situasi pelaksanaan sudah baik, namun tujuan belum tercapai, kualitas sumber daya pelaksanaan kurang, aparat pelaksana kurang profesional, dan lingkungan politik masyarakat yang tidak mengetahui peraturan, kondisi sosial pekerja dan Perekonomian yang tidak stabil berarti berkurangnya keterlibatan masyarakat. Kendalanya antara lain terbatasnya APBD, kondisi infrastruktur desa, kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat Desa Igal.

Penelitian kesembilan, oleh Muhammad Imanuddin Kandias Saraan, Sri Suwitri & A.P. Tri Yuniningsih dari Jurnal Administrasi Publik tentang Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Volume 9 nomor 2 tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Desa (ADD) di Perumnas Desa Simalingkar berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan rencana anggaran biaya (RAB), penyelesaian setiap kegiatan hingga penyusunan pertanggungjawaban. Dewan Desa Perumnas Simalingkar masih belum mampu menjadi faktor pendukung terlaksananya maksud dan tujuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 256 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa.

Kendala-kendala pengalokasian dana di tingkat desa, ditinjau dari sumber daya, sikap (alokasi), kondisi sosial ekonomi, politik, dan lain-lain, terutama meliputi: (1) Masih adanya permasalahan penyerapan dan kesalahan investasi; 2) Pemahaman pelaksana masih kurang terhadap maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Kurangnya pemahaman; 3) Rendahnya literasi; 4) Dua lembaga yang ada di Perumnas Desa Simalingkar kurang ideal yaitu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Penelitian kesepuluh, oleh Penny, Rani Wigati Ningrum, Nurwijayanto, Didid Aditya Tri Haryadi & Fransiska Prayoga Siska dari Jurnal Masyarakat dan Desa tentang Implementasi Program Pembangunan di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kota Pontianak. Volume 3 nomor 1 tahun 2023.

Hasil penelitian ini bahwa Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubulaya merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat akibat pembangunan infrastruktur dan peningkatan jumlah penduduk. Desa ini berbatasan langsung dengan Kota Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Berbagai fasilitas tersedia seperti sekolah, perkantoran, klinik dan pembangunan infrastruktur lainnya. Selain itu juga sangat dekat dengan aktivitas atau pusat perbelanjaan seperti Transmart Kubu Raya dan Bandara Supadio Pontianak. Hal ini menyebabkan pemerintah desa memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat untuk mendukung kelancaran aktivitas dan aktivitas perekonomian masyarakat.

Dari hasil penelitian ini, kepala desa berhasil memuaskan masyarakat dengan pelaksanaan pekerjaan seperti pembangunan infrastruktur yaitu perbaikan jalan, drainase, jembatan, pembangunan balao dll. Kegiatan yang dilakukan menikmati gotong royong masyarakat setempat. Selain program olahraga tingkat lanjut, terdapat pula pengembangan non-olahraga seperti pendampingan dan promosi keterampilan masyarakat kepada masyarakat berbasis kearifan lokal.

Penelitian-penelitian diatas dipilih karena mempunyai relevansi dengan topik yang akan di angkat dalam peneltian ini. Pada peneltian-peneltian terdahulu ini ada kesamaan-kesamaan seperti sama-sama mencoba menjelaskan kebijakan pemerintah desa dalam menjalankan perogram-program pembangunan infrastruktur yang ada di

desa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Kemudian kesamaan dari penelitian-penelitian terdahulu ini juga sama-sama mencoba menjelaskan sikap dan peran masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur desa. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan masih belum optimal.

Hal yang membedakan penelitian penulis dan penelitian sebelumnya yaitu Lokasi. Penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di lokasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Ini bisa menjadi perbedaan geografis yang dapat mempengaruhi kondisi lokal dan kebutuhan yang berbeda. Kemudian Penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada penelitian sebelumnya. Dimana bukan hanya membahas bagaimana infrastruktur berfungsi, tetapi lebih menekankan pada implementasi kebijakan dalam beberapa sektor, seperti transportasi, produksi pertanian, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pendekatan pada Implementasi Kebijakan Penelitian ini juga akan lebih mendalam dalam menjelaskan bagaimana program-program pembangunan diimplementasikan. Hal ini akan memperhatikan proses implementasi serta faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan kebijakan pembangunan infrastruktur. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian dari penulis memiliki fokus yang lebih holistik dan terperinci dalam memahami tidak hanya apa yang dibangun, tetapi juga bagaimana implementasi kebijakan tersebut memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan ini, Anda dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan relevan bagi pembuat kebijakan serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur.

G. Kerangka Konseptual

1. Governing (Perbuatan Memerintah)

Menurut Sutoro Eko (2020: 20), Governing adalah kata yang berarti memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan untuk mengatur suatu wilayah, kawasan, atau negara. Perbuatan memerintah mencakup fungsi, tindakan, proses dan cara.

Dilihat dari ketiga kalimat di atas, maka dalam arti luas yang dimaksud dengan pemerintahan adalah perilaku pemerintahan yang dilaksanakan oleh organ legislatif, administratif, dan yudikatif suatu negara untuk mencapai tujuan administratif nasional. Pemerintahan dalam arti sempit mengacu pada perilaku tata kelola yang dilaksanakan oleh badan-badan administratif dan stafnya untuk mencapai tujuan administratif nasional. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri dari berbagai komponen pemerintahan yang saling bergantung dan mempengaruhi pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

Pemerintahan adalah tradisi alami umat manusia ketika manusia membentuk komunitas, desa, kerajaan, atau negara bangsa. Dunia, negara, kerajaan, wilayah, desa, masyarakat adat semuanya dapat disebut sebagai arena pemerintahan. Joss Raadschelders (2015) menyatakan bahwa pemerintahan bersifat universal, yaitu ada di seluruh dunia, namun pemerintah mempunyai ikatan budaya yang berbeda-beda. Sebagaimana dikemukakan Alexis de Tocqueville (1835), tradisi ini menjelaskan bahwa pemerintahan adalah seni hidup bersama demi kebaikan dan tujuan bersama.

Governing pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dimana pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa, serta merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa, yang biasa disebut Pemdes, merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengelola wilayah setingkat desa (Purnawati, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) dan (3), yaitu:

- Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
- Pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan di tingkat desa meliputi kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang belum dipenuhi oleh daerah dan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tanggung jawab bantuan pemerintah provinsi dan/atau kabupaten. Pengelolaan kekuasaan desa didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Kekuasaan Desa, yang menentukan bentuk dan struktur pencalonan dan pemilihan organisasi desa, serta penetapan, pembentukan, dan pemilihan perangkat desa. Penetapan lembaga kemasyarakatan dan penetapan serta pembentukan badan musyawarah desa.

Pemilihan dan penetapan anggota tim perwakilan desa, penyusunan dan penetapan pendapatan anggaran dan belanja desa, pengesahan dan pelestarian lembaga adat, penetapan peraturan perundang-undangan desa, penetapan kerjasama antar desa, penetapan pinjaman desa, penetapan dan pembentukan desa Badan usaha yang terafiliasi, penerbitan izin tingkat desa, penetapan tanah khusus tingkat desa, pemeliharaan keamanan masyarakat dan keamanan masyarakat, pengelolaan tugas bantuan, pengelolaan dana bagi hasil, perimbangan pendapatan dan belanja fiskal kabupaten, kota, pusat dan daerah.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa desa mempunyai kekuasaan berdasarkan hak asasi desa, serta urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pengelolaan desa oleh kekuasaan kabupaten atau kota, tanggung jawab bantuan pemerintah, dan tanggung jawab pemerintah. pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota dan lain-lain yang diselenggarakan oleh urusan Pemerintahan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab desa.

Sedangkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, tugas pemerintah desa adalah membina kehidupan masyarakat desa, mengembangkan perekonomian desa, memelihara ketertiban keamanan masyarakat. dalam masyarakat desa, dan menengahi perselisihan masyarakat. Menyampaikan rancangan peraturan desa kepada kepala desa atau kepala desa, dan bekerja sama dengan komite desa untuk merumuskan peraturan desa, memberikan laporan pertanggungjawaban administrasi pemerintahan desa kepada kepala kabupaten atau walikota, dan memberikan laporan informasi

pertanggungjawaban kepada komite desa, melaksanakan pertemuan kehidupan demokratis, melaksanakan pemerintahan desa berdasarkan prinsip integritas, tidak korupsi, dan tidak nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra pemerintah desa, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menjalankan tugas dengan baik di desa penyelenggaraan pemerintahan, serta membina, melindungi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas governing pemerintah desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, dimana pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa secara mandiri mengatur dan mengatur pemerintahannya demi kemandirian desa dan kepentingan kolektif desa.

2. Impelementasi Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu. definisi implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli.

Menurut Nurman Usman implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah padanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan sesuatu kegiatan yang yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan Menurut Van Meter dan Van horn dalam Budi Winarno (2007:158), Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, lembaga pemerintah, atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam beberapa

keputusan. Badan-badan ini melakukan tugas-tugas pemerintah yang mempengaruhi warga negara.

Dari kedua pernyataan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok. Dengan kata lain bahwa implementasi merupakan progres awal yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang tersusun matang dan terencana untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi sangatlah penting untuk memwujudkan sebuah ide atau gagasan yang bisa menuangkannya dalam Tindakan nyata. Dalam pemerintahan implementasi sangatlah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga yang bukan hanya memberikan janji-janji tanpa ada tindakan nyata.

Istilah implementasi sangat berkaitan erat dengan sebuah kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Implementasi kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Pengertian Implementasi kebijakan merupakan penjabaran dari tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2005:65).

Mengutip pendapat berbagai ahli, Winarno (2002: 29) menyatakan bahwa “jika suatu program kebijakan tidak dilaksanakan maka hanya akan menjadi catatan elit”. Artinya implementasi kebijakan merupakan kelanjutan

dari suatu rencana atau kebijakan, oleh karena itu rencana kebijakan yang merupakan alternatif pemecahan masalah harus dilaksanakan, yaitu dilakukan oleh lembaga administratif dan aktor pemerintah.

Wahab (2002: 59) berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sangatlah penting. Artinya, kebijakan baik yang dirumuskan secara demokratis dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan hanya akan tinggal di atas kertas jika tidak dilaksanakan dengan baik dan melalui prosedur yang benar. Faktanya, banyak kebijakan publik yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga publik lainnya yang gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa kebijakan tersebut hanya “dibungkus” dalam dokumen resmi karena tidak dilaksanakan. Bukannya mereka tidak mau menerapkannya, namun ada banyak faktor yang membuat kebijakan di atas kertas tidak mungkin diterapkan. Bisa juga terkendala oleh perubahan sosial politik atau bahkan faktor lingkungan alam.

Dari kutipan para ahli diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan tidak mudah untuk dilakukan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam mencapai tujuannya. Termasuk faktor kebijakan itu sendiri, terkadang karena konten yang terkandung di dalamnya dianggap bermasalah dan menjadi salah satu faktor utama penghambat implementasi kebijakan. Diasumsikan bahwa isi kebijakan sudah dianggap baik, namun faktor lain dari dalam atau luar pelaksana kebijakan juga bisa menjadi faktor penghambat proses implementasi kebijakan. Singkatnya,

banyak faktor kunci yang menghambat implementasi kebijakan, sehingga tahapan implementasi kebijakan seringkali dianggap sebagai tahapan paling kritis yang menentukan apakah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada kebijakan itu sendiri, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh hasil dari suatu kebijakan. Implementasi Kebijakan merupakan program-program yang diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Penilaian keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan dapat diukur dari sudut pandang kemampuan sebenarnya untuk melanjutkan dan melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan implementasi kebijakan dalam bentuk nyata, otomatis mempunyai jaminan implementasi program yang baik

Berkaitan dengan implementasi kebijakan dikalurahan Wonokerto penulis menggunakan konsep kebijakan dari George C. Edward III (1980), Dalam pandangan Edwards Implementasi Kebijakan di pengaruhi empat variabel, (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi dan; (4) Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan yang sukses mengharuskan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan.

Maksud dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran agar distorsi dalam proses implementasi dapat dikurangi. Jika maksud dan tujuan suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak dipahami oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran kemungkinan besar akan menolak.

2. Sumber Daya

Sekalipun isi kebijakan dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, implementasinya tidak akan efektif jika pelaksana kebijakan tidak mempunyai sumber daya untuk melaksanakannya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, keyakinan terhadap kemampuan pelaksana, dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal kertas.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan sifat seorang eksekutif seperti komitmen, kejujuran, sikap demokratis. Jika eksekutif mempunyai karakter yang baik, maka ia dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik sesuai keinginan pengambil kebijakan. Ketika sikap atau pandangan para pelaksana dan pengambil kebijakan berbeda, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan rendahnya tingkat komitmen dan kejujuran pihak berwenang. Seperti halnya di Indonesia, hal ini merupakan

contoh nyata rendahnya komitmen dan kejujuran pejabat dalam melaksanakan rencana pembangunan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan mempunyai dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktural yang penting dalam setiap organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman tindakan bagi setiap pelaksana. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan, menciptakan birokrasi, dan mempersulit prosedur birokrasi. Hal ini pada gilirannya menyebabkan kurangnya fleksibilitas dalam kegiatan organisasi.

3. Pembangunan Desa

Pasal 78(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya, alam, dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

1. Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa: Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

- 1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 3) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 5) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- 6) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 80 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

- 1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- 2) Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- 3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81 mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa:

- 1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- 3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- 4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- 5) Pembangunan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pasal 81 mengenai Pengawasan Pembangunan Desa:

- 1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- 2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.
- 3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana

Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali.

- 5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Setiap desa menyusun rencana pembangunan dengan mengacu pada rencana pembangunan kabupaten (kota). Dokumen perencanaan pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan desa dan menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Rencana pembangunan desa disusun dengan peran serta masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rapat Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya Masyarakat Desa berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

4. Pembangunan Infrastruktur Desa

Infrastruktur adalah sebuah fasilitas fisik yang bisa dilihat dan dirasakan langsung seseorang atau khalayak umum seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan.

Menurut (Kuncoro 2010: 20), infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi dan sosial manusia. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh

masyarakat atau terlihat secara kasat mata, misalnya berupa prasarana, gedung, fasilitas umum, dan lain-lain.

Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik atau sering disebut prasarana merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pelayanan publik. Keberadaan infrastruktur yang baik sangat berperan penting dalam mendukung masyarakat mewujudkan hak-hak dasarnya seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas di berbagai bidang.

Pembangunan infrastruktur desa dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Hasil pembangunan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa, sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Seperti halnya pembangunan infrastruktur di Kalurahan Wonokerto, hal ini penting dan perlu. Temuan peneliti di lokasi adalah pembangunan infrastruktur di Kalurahan Wonokerto masih minim sarana dan prasarana dasar. Pembangunan infrastruktur pedesaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup manusia serta mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana pedesaan, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya pedesaan secara berkelanjutan. Sumber daya alam dan lingkungan hidup, oleh karena itu pembangunan di bidang infrastruktur sangat diperlukan.

Infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Hasil pembangunan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh

masyarakat desa, sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Dalam Negeri (Ulyani 2013:19) menyatakan bahwa pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau sarana yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, membangun sarana dan prasarana fisik sebagaimana peruntukannya, berupa:

1. Mengembangkan infrastruktur transportasi pedesaan untuk mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat pedesaan, yaitu jalan, jembatan, tempat pendaratan perahu;
2. Mengembangkan infrastruktur pendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi pedesaan;
3. Mendukung pembangunan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan air minum dan sanitasi pedesaan.

Dari konsep teoritis yang dikemukakan para ahli di atas bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur merupakan hasil respon pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah adalah pelaku dan lembaga yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2014), kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kejadian, kasus atau fenomena secara alamiah, dimana dalam

penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrument kunci. Penelitian biasanya bertujuan menggambarkan, menjelaskan, dan menerangkan kasus atau fenomena yang akan diteliti secara menyeluruh dan mendalam untuk menggali makna. Sehingga karakteristik dari penelitian kualitatif adalah penelitian terbuka yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan jumlah yang relative kecil.

2. Unit Analisis

a. Objek penelitian

Menurut Sugiyono (2017:41) “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal”. Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi pembangunan Infrastruktur di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

b. Subjek penelitian

Didalam penelitian ini, Unit analisis untuk menentukan informan yaitu menggunakan metode Purposive sampling. Sugiyono (2017) mendefinisikan bahwa purposive sampling merupakan salah satu jenis pengambilan informan dengan memberikan pertimbangan tertentu, seperti informan dianggap sebagai pihak yang memahami permasalahan yang akan diteliti sehingga memberikan kemudahan peneliti dalam menjelajahi situasi sosial yang akan diteliti. Sehingga dalam penelitian ini subjek penelitian yang akan di pilih yaitu;

Tabel 1.1
Daftar Informan Wawancara

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Usia
1	Riyanto Sulistyono Budi	Lurah	S1	54
2	Samijo	Carik	S1	32
3	Tauqid Armunanto	Ulu-ulu	S1	30
4	Eko Wahyudi	Pangripto	Doktorandus	55
5	Sutarjo	Ketua BPD Wonokerto	Purnawirawan	58
6	Purwanto	Ketua LPMD Wonokerto	SLTA	52
7	Ganjar Asmara	Dukuh Dukuhsari	SLTA	45
8	Tri Hartono	Dukuh Mangunsari	SLTA	46
9	Dalim	Ketua Kelompok Tani	SLTA	48

(Sumber: Hasil wawancara Peneliti tahun 2022)

3. Teknik pengumpulan Data

a. Observasi/pengamatan

Observasi adalah suatu Teknik pengambilan data dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis dari obyek penelitian sehingga dapat memperoleh data yang diperlukan (Sutrisno Hadi, 2015:136). Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana

peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan Ridwan (2004). Dengan demikian Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat langsung situasi/keadaan sebenarnya di lokasi penelitian sebelum penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati keadaan wilayah di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Sejauh ini yang sudah dilakukan peneliti dalam melakukan observasi adalah mengamati secara langsung ke lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dan juga masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan Infrastruktur. Di sisi lain peneliti juga mengamati serta mengunjungi langsung infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto untuk mendukung lajunya pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Wonokerto. Kemudian Penulis juga akan mengamati Kinerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam Pembangun infrastruktur, Hubungan Masyarakat tani dan Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam Pengimplementasian pembangunan infrastruktur, Kondisi Sosial Masyarakat serta Kedala yang dihadapi pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam mengimplementasikan Pembangunan Infrastruktur.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara sebagai pengumpulan data untuk penelitian. Wawancara adalah suatu pola khusus dari sebuah interaksi yang dimulai secara lisan untuk suatu tujuan tertentu dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik dengan

suatu proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan (Robert Kanh dan Daniel Kats 2006). Menurut Kontjaraningrat (2002) wawancara merupakan suatu cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan sebuah informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara tatap muka.

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara interviewer dan interview secara lisan untuk mendapatkan sebuah informasi. Dengan melakukan wawancara, data yang diperoleh lebih banyak dan informasi yang diperoleh akan lebih akurat. Hal-hal yang akan di wawancarai oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan seperti; perbuatan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, realasi pemrintah desa dengan masyarakat dan faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian pembangunan infrastruktur di Kalurahan Wonokerto.

Dalam pelaksanaan wawancara dengan informan yang ada di Kalurahan Wonokerto, penulis menggunakan cara wawancara dengan semiterstruktur, yakni jenis wawancara yang dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan secara terbuka dan lebih mendalam. Pewawancara tidak mengajukan persoalan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara jenis ini lebih terarah. Informan dalam kesempatan ini dimintai pendapat, ide-ide, persepsi, pengalaman, dan

lain-lain. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat hingga merekam apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, disekolah, di tempat kerja, dimasyarakat dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan lebih kredibel jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono,2016).

Gunawan (2013: 180) menyebutkan kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Dokumentasi yang akan di ambil oleh penulis berupa memenuhi data analisis yang akan dimuat seperti; RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa), RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Berkaitan dengan dokumen yang di butuhkan peneliti pada penelitian ini seperti foto dan rekaman informasi dari narasumber. Adapun dokumen lain yang mendukung analisisnya seperti RPJMKal Wonokerto, RKPKal dan APBKal.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan diperoleh melalui berbagai sumber, maka data tersebut akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa terdapat 3 aktivitas yang digunakan dalam analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

Dalam melakukan reduksi data yang dilakukan oleh peneliti di kalurahan wonokerto yaitu dengan melakukan penyederhanaan data. Hal ini dilakukan karena data yang ada pada rekaman informasi yang disampaikan oleh narasumber masih berupa data kasar, sehingga peneliti melakukan pemilahan data informasi yang pada rekaman ini untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Menurut Miles dan Huberman (2014), yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya apa yang telah dipahami sebelumnya.

Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, grafik, bagan, matriks serta jaringan yang menggabungkan informasi hingga tersusun dalam sebuah bentuk yang padu dan mudah didapat yang kemudian memudahkan melihat apa yang sedang dialami atau terjadi, apakah kesimpulan sudah benar dan tepat atau sebaliknya melakukan analisis ulang atau kembali.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2016). Kesimpulan data penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. (Sugiyono. 2016).

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang di temui. Dari data yang diperoleh di lapangan, maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut.

BAB II

PROFIL KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Sejarah Kalurahan Wonokerto

Wonokerto merupakan Kalurahan yang berada di lereng gunung Merapi dan terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awalnya, Kalurahan Wonokerto merupakan penggabungan dari beberapa wilayah yang terdiri dari 4 (empat) kalurahan yaitu Kalurahan Tunggularum, Kalurahan Ledok Lempong, Kalurahan Tunggul, dan Kalurahan Dadapan.

Pada tahun 1947 sampai dengan tahun 1954 dipimpin oleh Bapak Niti Pawiro, pusat pemerintahan desa berada di Padukuhan Dadapan menempati Rumah Bapak Lurah Niti Pawiro. Pada masa tersebut pembangunan desa belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan terbatasnya dana dan situasi masih dalam gejolak keamanan. Selanjutnya tahun 1954 sampai dengan tahun 1961 Pada tahun tersebut Desa Wonokerto dipimpin oleh Wiro Sudarmo, Kantor pemerintahan desa berada di Padukuhan Sangurejo. Pada masa tersebut telah dirintis pembangunan jalan, jembatan saluran air dan pembuatan lapangan Punthuk.

Tahun 1962 sampai dengan tahun 1996, pada masa ini Kalurahan Wonokerto dipimpin oleh Bapak Sastro Diharjo, awal kepemimpinannya kantor kepala Desa Wonokerto masih di rumah Bapak Lurah Desa yaitu di Nganggrung Lor Wonokerto Turi Sleman dan sedangkan mulai tahun 1968 Kantor Desa Wonokerto pindah di Dusun Imorejo, Wonokerto, Turi. Adapun, hasil-hasil pembangunan antara lain pembangunan saluran air Bedhog Krasak, Sempu Baru, Sempu I dan Pandan Arum, pembangunan jalan tembus Imorejo Kiringan, pembangunan jalan Sempu-Kaliurang, pembangunan jalan Nganggrung-Garongan, pembangunan SD Banyuurip I dan II, SD Nganggrung I dan II,

SD Muh Balerante, pembangunan gedung kantor desa dan barak pengungsian, serta pembangunan puskesmas pembantu.

Tahun 1996 sampai dengan tahun 2004, kepala desa dijabat oleh Bapak Suhartono. Hasil-hasil pembangunannya antara lain rehab pasar desa, pembangunan kios desa, dan juga pembangunan pasar ikan. Tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, pada periode ini Kalurahan Wonokerto dipimpin oleh Bapak Kasidi. Adapun, hasil-hasil pembangunan yaitu berupa pembangunan gedung kantor desa dan pembuatan pendopo kantor desa Wonokerto. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, pada periode ini kepala desa Wonokerto dipimpin oleh Bapak Tomon Haryo Wirosobo. Hasil pembangunan diantaranya yaitu pemberdayaan masyarakat desa wisata, pendirian relawan bencana, dan juga pembangunan gapura.

B. Geografis Desa

a. Kalurahan Wonokerto

Kalurahan Wonokerto berada dilembar kaki gunung merapi yang terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta. Secara Geografis desa Wonokerto terletak pada ketinggian 400-900m dari permukaan air laut. Dengan ketinggian tersebut, sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian.

Kalurahan Wonokerto adalah daerah pertanian yang memiliki 26 sumber mata air yang mengalir ke beberapa sungai yang mencukupi kebutuhan irigasi pertanian. Curah hujan rata-rata 3,908mm pertahun dengan suhu udara 24°C-28°C. Sumber air tanah yang mengalir di bawah permukaan berada di jalur mata air Turi-Sleman yang pemanfaatannya digunakan untuk sumber air bersih dan irigasi. Akan tetapi pada musim kemarau sebagian wilayah kekurangan air untuk pertanian, sedangkan untuk kebutuhan air minum sumber air tanah atau sumur

di Kalurahan Wonokerto masih tercukupi. Kondisi tanah di Kalurahan Wonokerto merupakan daerah perbukitan atau pegunungan yang subur dengan struktur tanah berpasir dan berbatu cadas.

b. Batas Wilayah

Secara administratif Kalurahan Wonokerto merupakan salah satu desa yang berada di Keapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa 47 Yogyakarta. Wilayah Kalurahan Wonokerto memiliki batas-batas dengan wilayah sebagai berikut

Sebelah Timur : Kalurahan Girikerto, Kecamatan Turi.

Sebelah Barat : Kalurahan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Sebelah Utara : Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi.

Sebelah Selatan : Kalurahan Donokerto, Kapanewon Turi.

Kalurahan Wonokerto terdiri dari 13 pedukuhan yang terdiri dari 13 padukuhan yang terdiri dari 63 RT dan 39 RW dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Wilayah Padukuhan, RT dan RW Kalurahan Wonokerto

No	Nama Padukuhan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Tunggularum	2	4
2	Gondoarum	2	4
3	Sempu	2	7
4	Banjarsari	3	5
5	Manggungsari	2	4
6	Imorejo	2	4
7	Jambusari	3	4

8	Dukuhsari	2	4
9	Kembang	2	4
10	Pojok	2	4
11	Sangurejo	2	5
12	Becici	3	6
13	Dadapan	2	5
Total		29	63

(Sumber Data: Monografi Desa Wonokerto Tahun 2022)

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa padukuhan Becici merupakan Padukuhan yang memiliki luas wilayah yang terbesar dibandingkan dengan padukuhan lainnya di Kalurahan Wonokerto. Hal ini dapat dilihat dari jumlah RT dan RW pada padukuhan Becici yang jumlahnya lebih banyak, hal tersebut dikarenakan oleh kondisi wilayah padukuhan Becici yang relatif lebih baik dibandingkan padukuhan lainnya.

C. Demografi Desa

a. Jumlah Penduduk

Kondisi Demografis merupakan informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuan. Kalurahan Wonokerto memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.125 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 5.075 jiwa laki-laki dan perempuan sebanyak 5.050 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kalurahan Wonokerto dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin

No	Nama Padukuhan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	
1	Tunggularum	308	395	703
2	Gondoarum	288	295	583
3	Sempu	557	535	1092
4	Banjarsari	394	387	781
5	Manggungsari	337	359	696
6	Imorejo	335	314	649
7	Jambusari	354	358	722
8	Dukuhsari	362	312	674
9	Kembang	313	359	672
10	Pojok	340	285	625
11	Sangurejo	502	457	959
12	Becici	487	486	973
13	Dadapan	498	498	996
Total		5.075	5.050	10.125

(Sumber: Data kependudukan Kalurahan Wonokerto 2022)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan seimbang dengan perbandingan laki-laki sebanyak 5.075 dan perempuan 5.050 dan Padukuhan Sempu merupakan penduduk terbanyak yakni 1092 dengan jumlah penduduk laki-laki 557 dan penduduk perempuan sebanyak 535 orang.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Unsur pendidikan jangan dianggap akan sangat mempengaruhi terhadap pembangunan daerah, hebatnya apabila penduduk daerah tersebut memiliki pendidikan yang lebih baik maka diyakini daerah tersebut memiliki SDM (sumber daya manusia) yang mumpuni pula untuk pembangunan daerah tersebut. Untuk melihat jumlah penduduk Kalurahan

Wonokerto berdasarkan tingkat pendidikan yang dijalani menurut data monografi Kalurahan Wonokerto Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum Sekolah	683
2	PAUD	326
3	Ijazah TK	735
4	Ijazah SD	2.678
5	Ijazah SMP	1.989
6	Ijazah SMA	2.314
7	Ijazah Akademi/PT	375
8	Tidak Sekolah	986
Jumlah		10.086

(Sumber Data: Monografi Desa Wonokerto Tahun 2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dengan ijazah terakhir SD menempati porsi terbesar yaitu sebanyak 2.678 jiwa, sedangkan jumlah pendidikan yang paling terkecil atau sedikit adalah pendidikan anak usia dini (PAUD) sebanyak 326 jiwa.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Masyarakat yang berada di Desa Wonokerto pada umumnya bekerja sebagai petani, khususnya petani salak. Penduduk di Desa Wonokerto tidak semuanya bekerja di sektor pertanian, ada yang bekerja sebagai buruh kasar/tani, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wiraswasta, Karyawan Swasta, dan lain-

lain. Tetapi mayoritas penduduk di Desa Wonokerto bekerja sebagai petani.

Dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5

Jumlah penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	925	855	1.810
2	Pertambangan	57	17	74
3	Listrik, dan gas	33	19	52
4	Sektor bangunan	589	188	777
5	Perdagangan, hotel dan restoran	360	287	647
6	Industry pengolahan	70	36	106
7	Pengangkutan dan komunikasi	110	130	240
8	Jasa keuangan dan persewaan	189	132	321
9	Sektor wisata	520	125	645
10	Lain-lain	2.222	3.261	5.483
Total		5.075	5.050	10.215

(Sumber: Data Penduduk Kalurahan Wonokerto 2022)

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Kalurahan Wonokerto sangat bervariasi. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Wonokerto bermata pencaharian petani. Hal ini berarti Kalurahan Wonokerto masih bertumpu pada sektor pertanian. Dengan pemahaman ini, maka kita dapat mengetahui bahwa Kalurahan Wonokerto didominasi oleh lahan pertanian. Oleh karena itu, reforma agraria merupakan kebijakan yang mesti dilakukan di Kalurahan Wonokerto. Mata Pencaharian lain masyarakat Kalurahan Wonokerto seperti peternak, Pegawai Negri Sipil, Karyawan Swasta dan Buruh Kasar.

D. Kondisi Fisik Wilayah

Luas wilayah Kalurahan Wonokerto 1.002,9 Ha, yang terdiri dari wilayah untuk sawah/pertanian, ladang atau tegalan, perkebunan, pemukiman, industri, perdagangan dan jasa, hutan rakyat dan lain-lain. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan Eksisting Kalurahan Wonokerto

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1	Sawah/Pertanian	236,4	23,57%
2	Ladang/Tegalan	187,1	18,66%
3	Industri	1,2	0,12%
4	Perkebunan	314,3	31,34%
5	Pemukiman	238	23,73%
6	Perdagangan dan Jasa	3,9	0,39%
7	Hutan	17	1,70%
8	Lain-lain	5	0,50%
Total		1002,9	100,00%

(Sumber Data: Monografi Desa Wonokerto Tahun 2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan lahan eksisting terbesar di Kalurahan Wonokerto adalah untuk perkebunan yaitu seluas 314,3 Ha, disusul lahan sawah/pertanian seluas 236,4 Ha, lahan ladang/tegalan seluas 187,1 Ha, lahan pemukiman seluas 238 Ha, lahan hutan seluas 17 Ha, lahan lain-lain seluas 5 Ha, dan lahan perdagangan dan jasa seluas 3,9 Ha. Sedangkan lahan paling sedikit yaitu lahan untuk industri dengan luas 1,2 Ha. Dari luasan wilayah tersebut masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, keadaan ini membawa pengaruh yang kuat dalam hal sumber daya pangan dan mata pencaharian penduduk Kalurahan Wonokerto

E. Kondisi sosial, Ekonomi dan Budaya

a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat Kalurahan Wonokerto yang penuh kebersamaan, kegotong royongan hingga saat ini masih terpelihara dengan baik. Nilai-nilai kekeluargaan juga masih dijunjung tinggi hingga setiap ada persoalan yang muncul selalu diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan melalui musyawarah untuk mufakat. Disamping itu hubungan kekerabatan dan keterikatan yang kuat mendorong masyarakat untuk saling bantu membantu baik dalam kesusahan maupun ketika masyarakat punya hajatan seperti keduri/kondangan yang sering dilaksanakan untuk memperingati hari-hari besar islam maupun peringatan-peringatan lainnya. Banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang berkembang dan berjalan aktif. Adapun organisasi-organisasi yang ada di seluruh wilayah Kalurahan Wonokerto di masing-masing padukuhan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.7

Jumlah organisasi kemasyarakatan

No	Padukuhan	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan (PerHari/Minggu/Bulan/Tahunan)	Jumlah Peserta(jiwa)	Penanggung Jawab Kegiatan	Keterangan
1	Tunggularum	Gotong-royong	1x 1 bulan	173	Ketua RT	
		Arisan	1x 1 bulan	173	Ketua RT	
		Siskamling	1x 1 minggu	50	Ketua RT	
		PKK	Tiap bulan	100	Kader PKK	
2	Gondoarum	P3A	Tiap bulan	40	Ketua	
		Karang Taruna	Tiap bulan	60	Ketua Kader	
		PKK	Tiap bulan	50	PKKKader	
		Posyandu	Tiap 2 Minggu	50	PKK	
		Pertemuan RT	Tiap bulan	100	KetuaRT	
3	Sempu	Siskamling	Tiap minggu	30	Dukuh	
		Gotong-royong	Tiap minggu	100	Ketua RW	
		Temu warga	Tiap bulan	200	Ketua RT	
			Tiap bulan			

4	Banjarsari	Siskamling Gotong-royong Karang Taruna	Tiap hari 2x 1 bulan Tiap bulan	45 150 50	LPMD LPMD Ketua	Keamanan lingkungan – Kebersihan lingkungan
5	Manggungsari	Siskamling Gotong-royong Pertemuan RT	Tiap hari 2x 1 bulan 1 bulan	170 150 70	Dukuh Dukuh RT/RW	Keamanan lingkungan – Kebersihan lingkungan
6	Imorejo	Gotong-royong Simpan pinjam Arisan Siskamling Pengajian Merti bumi			Dukuh	
7	Jambusari	Siskamling Gotong-royong	Tiap hari 2x 1 bulan	159	Dukuh Dukuh	Menjaga keamanan lingkungan – kebersihan lingkungan
8	Dukuhsari	Arisan Kerja bakti Pengajian Kenduri	Tiap bulan	55 156 200 50	Dukuh Dukuh Takmir Dukuh	
9	Kembang	Siskamling Gotong-royong	Tiap hari 2x 1 bulan	170	Dukuh Dukuh	Keamanan ligkungan – Kebersihan lingkungan
10	Pojok	Siskamling Gotong-royong Temu warga	Tiap hari 2x 1 bulan Selapanan		Ketua RT Dukuh	
11	Sangurejo	Siskamling Gotong-royong Temu warga	Tiap hari 2x 1 bulan Selapanan		Ketua RT Dukuh	
12	Becici	Siskamling Gotong-royong	Tiap hari 2x 1 bulan	225	Ketua RT Dukuh	
13		LPMD PKK Lansia Karang Taruna Kel. Ternak Pengajian		299	Ketua RT Dukuh	Keamanan lingkungan – Kebersihan lingkungan

(Sumber Data: Monografi Desa Wonokerto Tahun 2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keorganisasian masyarakat yang berada di Kalurahan Wonokerto berjalan dengan baik. Ada beberapa kegiatan yang rutin dilaksanakan seperti kegiatan gotong-royong dan siskamling yang diadakan pada setiap padukuhan dengan jumlah hampir seluruh masyarakat ikut ambil bagian pada kegiatan tersebut.

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Kalurahan Wookerto terbagi menjadi beberapa sektor, sektor utama adalah pertanian termasuk didalamnya perkebunan salak,

perikanan, dan peternakan. Hal ini bisa dilihat dari mata pencaharian penduduk yang rata-rata adalah petani. Untuk sektor pertanian didominasi oleh pertanian/perkebunan salak pondoh yang merupakan pendapatan utama para petani dan merupakan sektor yang telah mengangkat perekonomian masyarakat Kalurahan Wonokerto. Akan tetapi sekarang kondisi pertanian belum tergarap secara optimal. Kondisi ini dipacu karena rusaknya sistem irigasi yang ada hampir diseluruh wilayah Kalurahan Wonokerto akibat dampak sekunder erupsi gunung merapi tahun 2010. Efek yang ditimbulkan dari rusaknya sistem irigasi adalah masyarakat hanya panen 2 kali dalam setahun sehingga panen salak pondoh menurun karena pertumbuhannya tidak maksimal.

Hampir semua masyarakat Kalurahan Wonokerto menanam dan berusaha yang berhubungan dengan salak pondoh, baik itu pengepul atau pedagang, penyedia angkutan ataupun jasa lainnya seperti membersihkan lahan salak pondoh. Namun demikian sektor yang lain seperti industri rumah tangga, perdagangan dan jasa juga banyak digeluti oleh masyarakat Kalurahan Wonokerto.

Walaupun mayoritas masyarakat Kalurahan Wonokerto adalah bekerja sebagai petani, tingkat kesejahteraan masyarakat Kalurahan Wonokerto dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8**Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan Wonokerto**

Tingkat Kesejahteraan Keluarga						
No	Nama Padukuhan	Sejahtera (KK)	Pra Sejahtera 1 (KK)	Pra Sejahtera 2 (KK)	Miskin	Jumlah
1	Tunggularum	10	37	55	71	173
2	Gondoarum	17	34	88	34	173
3	Sempu	300	0	0	30	330
4	Banjarsari	117	28	28	42	215
5	Manggungsari	93	25	24	28	170
6	Imorejo	49	53	67	27	196
7	Jambusari	30	45	47	68	190
8	Dukuhsari	32	56	36	24	148
9	Kembang	50	41	42	37	170
10	Pojok	29	55	62	26	172
11	Sangurejo	101	77	56	47	281
12	Becici	52	82	78	36	248
13	Dadapan	58	44	77	51	230
Total		938	577	660	521	2.696

(Sumber Data: Monografi Desa Wonokerto Tahun 2022)

Pada tabel 2.8 diatas menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kalurahan Wonokerto paling banyak masyarakat sejahtera terdapat pada Padukuhan Sempu, dengan total KK yang sejahtera berjumlah 300 KK, selanjutnya KK yang tingkat kesejahteraan masyarakat paling rendah terdapat pada Padukuhan Tunggularum dengan total KK sebanyak 10 KK. Fasilitas ekonomi dan perdagangan yang berada di Kalurahan Wonokerto sudah cukup lengkap dan memadai terutama untuk tinggkat layanan dengan skala lokal.

Pasar yang ada di Kalurahan Wonokerto tidak hanya melayani wilayah Kalurahan Wonokerto saja, akan tetapi melani juga desa sekitarnya.

Tabel 2.9
Sebaran Fasilitas Ekonomi Kalurahan Wonokerto

No	Padukuhan	Pasar Modern/ Swalayan/ Supermarket	Pasar Tradisional	Ruko	Toko	Warung/ Kios	Warung PKL
1	Tunggularum	-	-	-	-	9	1
2	Gondoarum	-	-	1	1	2	-
3	Sempu	1	1	-	5	29	8
4	Banjarsari	-	-	-	3	8	2
5	Manggungsari	-	-	-	-	10	-
6	Imorejo	-	-	-	-	8	-
7	Jambusari	-	-	-	-	7	2
8	Dukuhsari	-	-	-	-	11	-
9	Kembang	-	1	-	-	8	-
10	Pojok	-	-	-	-	11	1
11	Sangurejo	-	-	8	14	4	4
12	Becici	-	-	-	-	13	-
13	Dadapan	-	-	-	-	10	-
Total		1	2	9	23	130	18

(Sumber Data: Monografi Desa Wonokerto Tahun 2022)

Di sektor domestik, peran kaum perempuan dalam mengelola rumah tangga, seperti industri makanan dan minuman, kerajinan, salon, dan potensi lain yang belum tergarap secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan terkendala masalah modal, pemasaran hasil produksi maupun kurangnya skil/keahlian dari warga masyarakat yang potensial. Selain itu potensi perikanan/kolam ikan juga banyak dibudidayakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Di Kalurahan Wonokerto juga memiliki objek wisata, baik yang dikelola

oleh desa maupun oleh masyarakat yaitu Wisata Bumi Perkemahan di Padukuhan Pojok, Wisata alam di Padukuhan Tunggularum. Sedangkan peternakan yang di kembangkan di Kalurahan Wonokerto adalah ternak sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, bebek/itik, burung puyuh dan ayam. Harapan dikembangkannya potensi/usaha peternakan tersebut oleh masyarakat tidak lain juga untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, kegiatan ekonomi yang terdaat di Kalurahan Wonokerto diantaranya kelompok simpan pinjam sebanyak 10 Lemabaga dengan keanggotaan mencapai ratusan orang serta berbagai macam usaha kelontong yang sebagian besar di sekitar pasar Balerante.

c. Kondisi Budaya

Budaya yang berkembang di Kaurahan Wonokerto adalah budaya masyarakat agraris, salah satunya adalah sifat gotong royong dan kekeluargaan masyarakatnya masih tinggi. Keberadaan kesenian di Kalurahan Wonokerto sangat beragam yang bernuansa adat jawa seperti kesenian Jathilan, Kubro Siswo, Dayakan, Badwi, Wayang Orang sampai yang bernuansa islami seperti Hadroh. Semua berkembang dengan baik dan selaras dikarenakan masyarakat Kalurahan Wonokerto selain agamais juga mempunyai budaya kearifan lokal yang tinggi terhadap anggota masyarakat sekitar. Warga Kalurahan Wonokerto juga masih menjunjung tinggi adat istiadat mereka sebagai orang jawa, seperti masih menjalankan/melaksanakan berbagai upacara-upacara tradisi yang berkaitan dengan daur hidup atau *life circle*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Upacara Mitoni yaitu selamat pada saat usia kehamilan mencapai genap 7 bulan.
2. Upacara Puputan yaitu upacara selamat pada saat tali pusar bayi sudah lepas atau mengering.
3. Jagongan yaitu acara wungon (tidak tidur semalam suntuk) atau bertandang di rumah keluarga yang baru melahirkan bayi pada malam hari selama kurang lebih 7 malam (satu minggu).
4. Selapanan yaitu acara kenduri atau selamatan bertepatan dengan usia bayi 35 hari sebagai ucapan rasa syukur.
5. Upacara kematian, dari surtanah, upacara kenduri tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, setahun, dua tahun, sampai 1000 hari.
6. Upacara Khitanan yaitu tanda bahwa anak laki-laki sudah mulai memasuki aqil balig menjadi laki-laki dewasa.
7. Upacara pernikahan dengan berbagai urutan pernik pernik tradisi jawa seperti siraman, midodareni, ijab, panggih atau resepsi.
8. Upacara Adat Marti Bumi sebagai icon Kalurahan Wonokerto yang diwujudkan atas rasa syukur kepada Tuhan.
9. Upacara Adat Pager Bumi yang secara garis besar hampir sama dengan upacara adat Merti Bumi.

Kelompok RT (RukunTetangga) kegiatannya cukup mennojol dan fanatik akan pembangunan, baik dari pekerjaan dan segi pembiayaan meski demikian keatuan warga dusun masih tetap terpelihara. Even-even penting seperti peringatan hari besar nasional, hari besar keagamaan, dan

kegiatan adat dilaksanakan rutin setiap tahunnya, sehingga dalam kegiatan tersebut sebagai pembelajaran generasi penerusnya serta memberikan kesempatan kepada grup-grup seni budaya yang ada didalamnya untuk mengekspresikan kemampuannya. Semua kegiatan ini adalah sebuah bentuk realisasi masyarakat Kalurahan Wonokerto yang masih mengungkap budaya kekeluargaan.

Tabel 2.10

Jenis Kegiatan Budaya Kalurahan Wonokerto

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan/ Minggu, bulan, tahun	Jumlah Peserta Kegiatan	Penanggung jawab Kegiatan	Keterangan
1	Merti Bumi	1x 1 Tahun	500	Kristanto	
2	Merti Bumi, Nyadran, Jathilan, Syawalan, Natalan	Tiap Tahun	581 173 50	Ketua Panitia	
3	Badui/Kobrosiswo, Hadro/Rebana	1x 1 Minggu	204	Ridwan	Latihan
4	Tari Topeng Ireng	1x 1 Minggu	75	Supangat	Latihan
5	Kobrosiswo, Sholawatan	1x 1 Minggu	65 25		Latihan Latihan
6	Saparan, Jatilan	1x 1 Tahun	400		
7	Jatilan	1x 1 Bulan	50	Sumanto	Latihan
8	Sparan dan Nyadran	1x 1 Tahun	660	Dukuh	
9	Nyadran, Merti Dusun, Kubrosiswo/Rebana	1x 1 Tahun	890	Dukuh	
10	Kuda Lumping Nyadran Syawalan	Tiap Bulan Tiap Tahun Tiap tahun	45 500 150	Dukuh Dukuh Dukuh	Latihan rutin Latihan rutin
11	Merti Dusun	Tiap Tahun	650	Dukuh	
12	Gejog Lesung, Nyadran, Syawalan				
13	Sholawatan Laras Madyo Nyadran Syawalan	1x 1 Bulan 1 Tahun	20 299		
14	Kubro Siswo Bergodo/Prajurit Merti Bumi Sadranan Kenduri Hadroh Sinoman Gotong Royong	Per-Bulan Per- Bulan Per- Tahun Per- Tahun Per- Bulan Per- Bulan Per- Bulan Per- Per-Mingguan	100 100 300 2000 275 30 275 200	Wawan R Sarjono Dukuh Takmir RT/RW Harjito Pemuda Dukuh	Ds. Pulesari Ds. Pulesari Ds. Pulesari Padukuhan Padukuhan Ds. Kopen Ds. Kopen Padukuhan

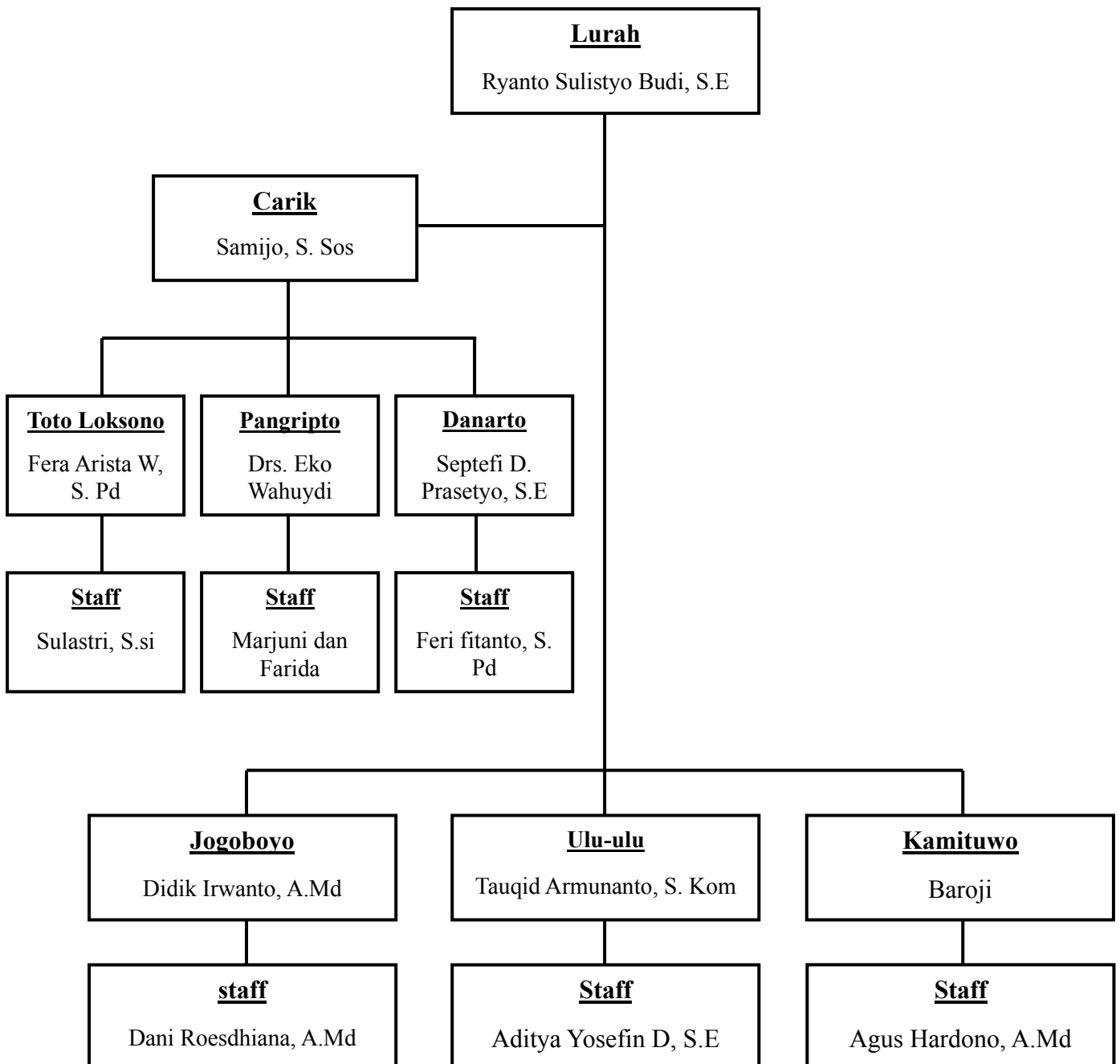
(Sumber Data: Monografi Desa Wonokerto Tahun 2020)

Di Kalurahan Wonokerto terdapat berbagai kawasan heritage atau pusaka budaya, baik berupa pusaka alam maupun pusaka budaya (rumah tradisional yang

berupa joglo dan limasan). Bangunan maupun benda tersebut sebagian besar dalam kondisi yang cukup baik karena tetap terawat oleh masyarakat sekitar.

F. Struktur Organisasi pemerintah Kalurahan Wonokerto

Bagan 2.1
Struktur Pemerintahan Kalurahan Wonokerto



(Sumber Data: Profil Kalurahan Wonokerto Tahun 2022)

a. Visi Misi

1. Visi

WONOKERTO SEBAGAI KALURAHAN SIAGA BENCANA
YANG AMAN, NYAMAN, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA,
BERBUDAYA DAN RELIGIUS.

2. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana mengingat wilayah Kalurahan Wonokerto merupakan Kawasan Rawan Bencana (KRB) I, II, dan III khususnya bencana akibat Erupsi Gunung Berapi.
- 2) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) secara arif dan bijaksana.
- 3) Mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel, transparan, berintegritas, berdedikasi, bermartabat, bersih dari korupsi dan nepotisme (KKN) yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sendiri/golongan.
- 4) Menjadikan Kalurahan Wonokerto sebagai desa wisata yang didukung oleh sumber daya alam, seni, dan budaya, industri kreatif dan industri kuliner.
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan, budipekerti, agama, informal dan non formal untuk menciptakan sumber daya

manusia yang terampil, cerdas, budipekerti luhur, dan budaya saing.

- 6) Menjadikan Kalurahan Wonokerto sebagai desa yang sejahtera, adil, dan makmurbertumbuh pada tiga pilar yaitu Agro Industri, Agro Bisnis, dan Agro Wisata.

b. Kepala Desa

Kepala Desa atau yang bisa disebut dengan nama lain memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Menjalankan roda pemerintahan desa dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa).
2. Mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang akan diterapkan di suatu desa.
3. Menerapkan peraturan desa yang sudah disetujui bersama dengan BPD.
4. Menyusun serta membuat peraturan tentang anggaran pendapatan desa yang selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan bersama-sama dengan BPD.
5. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dan juga ekonomi desa.
6. Pembangunan yang hendak dilakukan di desa lebih dahulu dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan partisipasi semua warga.
7. Mewakili desa baik di luar pengadilan atau di dalam pengadilan serta memiliki hak menunjuk kuasa hukum sebagai wakil dirinya, tentunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
8. Melakukan kewajiban dan wewenang kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Skertaris Kalurahan

Tugas pokok dari sekretaris kalurahan antara lain Membantu persiapan kepala desa dan melakukan kegiatan administrasi kalurahan, menyiapkan bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Fungsi dari sekretaris desa antara lain:

1. Melaksanakan beraneka macam tugas administrasi dan menyiapkan keperluan lurah supaya tugasnya berjalan dengan lancar.
2. Apabila lurah berhalangan untuk melakukan tugasnya, maka sekretaris bisa menggantikan.
3. Sama halnya apabila lurah diberhentikan untuk sementara, maka yang memegang jabatan sementara atau melaksanakan tugas lurah untuk sementara adalah sekretaris kalurahan.
4. Mempersiapkan bantuan dalam melaksanakan penyusunan peraturan desa.
5. Mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Koordinasi tugas-tugas yang dilakukan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh lurah.

d. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum atau yang disebut dengan kaur umum ini tugas pokoknya yaitu membantu sekretaris kalurahan dalam melaksanakan tugas administrasi umum, kearsipan, tata usaha, inventaris kalurahan, dan menyiapkan segala bahan untuk rapat dan pembuatan laporan. Fungsi kepala urusan umum yaitu:

1. Pengendalian kearsipan dan surat masuk serta surat keluar.

2. Mencatat inventaris atau kekayaan desa.
3. Melakukan tugas administrasi umum.
4. Menyimpan, menyediakan, dan menyalurkan alat-alat tulis kantor serta bertanggungjawab dalam memelihara dan perbaikan terhadap perabot atau perlengkapan kantor.
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi perangkat desa.
6. Menyiapkan bahan untuk membuat laporan.
7. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris kalurahan.

e. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas pokok dari kaur pemerintahan antara lain membantu kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketertiban masyarakat suatu kalurahan, persiapan bahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa. Fungsi dari kepala urusan pemerintahan antara lain yaitu:

1. Melaksanakan administrasi kependudukan.
2. Mempersiapkan bahan untuk menyusun rancangan peraturan serta keputusan lurah.
3. Melaksanakan administrasi pertanahan.
4. Mencatat monografi kalurahan.
5. Mempersiapkan bantuan yang bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan dalam pemerintahan di kalurahan dan melakukan penataan kelembagaan masyarakat.
6. Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh lurah.

f. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala urusan pembangunan memiliki tugas pokok antara lain adalah membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis dalam hal pengembangan potensi kalurahan, mengelola administrasi pembangunan, mengelola pelayanan masyarakat. Fungsi kaur pembangunan antara lain adalah:

1. Sebagai pelaksana dalam kegiatan administrasi pembangunan.
2. Mempersiapkan bantuan untuk kajian pengembangan ekonomi masyarakat.
3. Melakukan tugas lain diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa.

g. Kepala Dusun/Dukuh

Kepala dusun atau dukuh memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu melaksanakan tugas dari lurah yang masih berada dalam wilayah kerjanya.
2. Melakukan sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat.
3. Membantu tugas lurah dalam membina serta koordinasi kegiatan RT maupun RW yang masih berada dalam wilayah kerjanya.
4. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh lurah.

Fungsi Kepala Dusun/Dukuh antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi pembangunan kalurahan, jalannya pemerintahan desa membina masyarakat yang ada di dusun.
2. Melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat dan tugas yang berhubungan dengan pembangunan atau melaksanakan koordinasi

perihal masalah pembangunan yang terjadi di kalurahan maupun di dusun.

3. Berusaha untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong sesama warga, atau dengan kata lain meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Melakukan usaha dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Melaksanakan beragam fungsi lain yang telah dilimpahkan oleh desa.

h. BPD (Badan Perwakilan Desa)

Tugas dari Badan Perwakilan Desa antara lain adalah:

1. Membahas tentang rancangan atau rencana peraturan desa yang dibuat bersama dengan kepala desa.
2. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa bekerja sama dengan kepala desa.
3. Memberi usulan tentang pengangkatan atau pemberhentian kepala desa.
4. Membentuk panitia dalam rangka pemilihan kepala desa.
5. Menampung, mengumpulkan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Taat kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.
7. Menjaga kehidupan demokrasi.
8. Menjaga keutuhan NKRI serta hukum nasional.
9. Menyerap serta melakukan tindak lanjut terhadap aspirasi atau pendapat warga.
10. Mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi ataupun golongan.

11. Menjaga hubungan kerja yang baik dan harmonis dengan lembaga kemasyarakatan.

G. Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun klasifikasi Belanja Kalurahan terdiri atas kelompok belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja bidang Pembangunan Kalurahan, Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Belanja bidang Belanja Tak Terduga. Hal ini dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11

Jenis bidang pembangunan Kalurahan Wonokerto tahun 2022-2027

No	Uraian	Tahun					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2.753.146.450	3.462.484.450	3.043.003.028	2.746.624.528	2.531.736.450	2.888.464.528
2	Bidang Pembangunan Kalurahan	428.266.000	9.776.216.800	8.534.675.284	8.502.066.200	10.450.275.200	9.587.228.951
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	1.988.400.000	1.766.073.001	3.496.653.001	2.356.261.000	2.393.974.001	1.901.866.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3.956.009.150	1.028.412.650	380.756.950	864.385.000	901.220.500	906.192.150
5	Bidang Tidak Terduga, Keadaan Mendesak Dan Penanggulangan Bencana	10.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000
Jumlah		9.135.821.600	16.063.186.901	15.465.088.263	14.479.336.728	16.122.206.151	15.308.751.629

(Sumber: APBKal Wonokerto Tahun 2022-2027)

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa total anggaran belanja kalurahan wonokerto pada tahun 2022 sebesar 9.135.821.600. Dari beberapa Klasifikasi belanja kalurahan diatas, bidang pemberdayaan masyarakat yang paling banyak dalam menggunakan anggaran Kalurahan. Sedangkan pada sektor pembangunan kalurahan hanya sebesar 428.266.000.

Formulasi kebijakan belanja kalurahan diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Kalurahan Wonokerto, dimana pada level kebijakan anggaran belanja kalurahan dicerminkan pada proyeksi belanja kalurahan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan pengembangan belanja kalurahan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2021-2026) diarahkan pada:

1. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan kalurahan, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) Pamong Kalurahan dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
3. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan kalurahan sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
4. Peningkatan akses informasi tentang belanja kalurahan oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.

5. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja kalurahan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan kalurahandan prioritas kebutuhan kalurahan serta pertimbangan kinerja.
6. Mengembangkan usaha dengan penyertaan modal kepada BUMKal sebagai upaya penambahan penghasilan asli kalurahan.
7. Peningkatan kapasitas Pamong Kalurahan agar dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan tepat dan cepat.
8. Pengembangan system informasi kalurahan dalam pemenuhan pemanfaatan teknologi modern.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Wonokerto sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak aparaturnya Desa/Kalurahan kepada masyarakat dalam mensosialisasikan kebijakan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari tiga indikator yaitu; *transmisi, kejelasan dan konsisten*. Dari tiga indikator ini dapat disimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan penyampaian informasi mengenai kebijakan pembangunan di sampaikan secara sistematis dan terstruktur. Akan tetapi dalam mencapai suatu target sasaran belum mendapatkan efektivitas yang baik, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui informasi mengenai kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah kalurahan.

2. Sumber Daya

Pada variabel Sumber Daya terdapat dua indikator yaitu: *Sumber daya manusia (implementor dan masyarakat) dan sumber daya non manusia (finansial dan fasilitas)* dalam meningkatkan produktivitas masyarakat tani. Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa, sumberdaya yang dimiliki oleh para implementor dan masyarakat di Kalurahan Wonokerto belum bisa menopang pembangunan yang ada. Hal ini ditandai dengan minimnya kapasitas dari implementor dan masyarakat seperti dalam hal keterampilan maupun ketersediaan tenaga ahli (bangunan). Sehingga dari kekurangan ini dapat menghambat produktivitas masyarakat tani.

Kemudian pada indikator kedua yaitu sumber daya non manusia yang mencakup finansial dan fasilitas. Seperti yang di ketahui bahwa pembangunan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya anggaran dan fasilitas yang cukup. Dari hasil temuan diatas dapat di simpulkan bahwa, ketersediaan anggaran dan fasilitas yang di sediakan oleh Pemerintah Kalurahan Wonokerto belum bisa membantu kekurangan yang di alami para petani. Hal ini di karenakan anggaran yang di kucurkan oleh pemerintah kalurahan wonokerto hanya 420 juta untuk pembangunan (fisik dan non fisik). Kemudian dalam ketersediaan fasilitas juga sangat bergantung pada anggaran yang di sediakan, dari hasil analisis di atas juga masih ada masyarakat mengeluh atas kurangnya fasilitas yang di sediakan. Hal ini dapat dilihat pernyataan di sampaikan oleh ketua kelompok tani, bahwa ada beberapa masyarakat tani yang mengeluh karena kekurangan pasokan air pada saat musim kemarau panjang. Mereka mengharapkan ketersediaan bak penampungan air dari pemerintah kalurahan, namun sampai saat ini belum ada satupun yang di sediakan. Dengan adanya kendala ini akan berimplikasi pada produktivitas para petani di Kalurahan Wonokerto.

3. Disposisi

Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Wonokerto terdapat dua indikator yaitu; *dedikasi* yang dimiliki oleh para implementor dan *insentif* yang di berikan oleh pemerintah kalurahan kepada implementor. Hasil analisis yang di lakukan oleh peneliti mengenai disposisi kebijakan dapat disimpulkan bahwa disposisi implementor dalam menjalankan tugasnya dengan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang di berikan oleh pemerintah kalurahan. Untuk Mengapresiasi kinerja para implementor pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat dengan memberikan bonus

tambahan diluar upah mereka. Dengan adanya insetif ini juga dapat menghindari para implmentor dari penyelewengan kepentingan.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan indikator Struktur Birokrasi yang ada di Kalurahan Wonokerto sudah terorganisir karena sudah memiliki mekanisme yang jelas dan juga para petugas sudah bekerja serta bertanggung jawab sesuai dengan SOP. Pada indikator Standar Operating Procedure (SOP) dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Wonokerto ini sudah berjalan baik dilihat dari aspek SOP dalam bentuk juknis yang telah dipahami dan dijalankan secara baik tugas dan tanggung jawab oleh pelaksana kebijakan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Wonokerto.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Penyampaian komunikasi yang dilakukan Lurah bersama perangkat Kalurahan Wonokerto harus lebih ditingkatkan dan dilaksanakan secara konsisten dan merata kepada masyarakat khususnya untuk para petani.
2. Melengkapi sumberdaya terutama fasilitas sarana dan prasarana untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembangunan yang akan dijalankan.
3. Peningkatan fasilitas sebaiknya dilakukan. Dengan menganggarkan khusus pada peningkatan fasilitas pendukung para petani hal ini agar porduktivitas para petani dapat berjalan dengan baik.
4. Pentingnya meningkatkan sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan mengenai teknologi komunikasi untuk meningkatkan SDM.

5. Diharapkan untuk pemerintah Kelurahan Wonokerto dapat melakukan sosialisasi lebih terhadap para implementor kebijakan agar lebih memahami isi dari SOP pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU dan E-book:

MS Jumroh (2021). *Teori Implementasi Kebijakan*. Setia Bala Putra Dewa.

<http://repository.stiabpd.ac.id/10/6/BAB%20III.pdf> (Diakses 15 Juni 2023)

<https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/publikasi/download/22> (Diakses 21 Juni 2023).

<https://desawonokerto.wordpress.com/about/letak-administrasi/> (Diakses 1 Juli 2023).

Memahami Ilmu Pemerintahan - Mazhab Timoho 5G Tahun 2020 (Diakses 1 Januari 2024).

Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.SI & Dr. Rudi Yusfiana, M.SI. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung.

JURNAL:

Amiral Amra Opransiski & Dadang Mashur (2023). *Implementasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desabidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Igal Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021*. *Jurnal Publicuho a peer reviewed and open access journal*.

Anisa Cikal Febrianti, Abubakar Iskandar & Rusliandy (2023). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infastruktur Melalui Program Samisade Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Ciawi*. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*.

Arya Bagus Pramudyansyah & Badrudin Kurniawan (2023). *Implementasi Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Dalam Pembangunan Infastruktur di Desa Jatidrojog Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*.

Heppy Sondakh, Michael Mantiri & Ventje Kasenda (2021). *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infastruktur di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan UNSRAT*.

Indra A. Pantow, Sofia Pangemanan & Ventje Kasenda (2019). *Implementasi Pembangunan Infastruktur Desa Dalam Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat, Studi Di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Pemerintahan (FISIPOL UNSRAT)*.

Moleong Lexy. (2002). *metode penelitian kualitatif*. bandung: CV. Remaja.

Muhammad Imanuddin Kandias Saraan, Sri Suwitri & A.P. Tri Yuniningsih (2019). *Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang*. *Jurnal Administrasi Publik*.

Penny, Rani Wigati Ningrum, Nurwijayanto, Didid Aditya Tri Haryadi & Fransiska Prayoga Siska (2023). *Implementasi Program Pembangunan di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kota Pontianak*. *Jurnal Masyarakat dan Desa*.

Wahyu Kurniawan & Karjuni Dt. Maani (2019). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan*

Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik.

Yanhar Jamaluddin & Rizqy Aqilla Haya Br Sinaga (2023). *Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.* Jurnal Ajudan Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara.

Yulianti, Abdul Kahar & Jurana (2023). *Praktik Good Governance Dana Desa Dalam pembangunan Infrastruktur; studi di Desa Tanauge Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.* Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia.

Sugiyono. (2008). *penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.* bandung: alfabeta.

Undang-undang:

Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang *Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.*

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA :

JABATAN :

USIA :

TINGKAT PEDIDIKAN :

PERTANYAAN :

1. Implementasi Kebijakan Pembangunan infrastruktur transportasi guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa.
 - a. Bagaimana Komunikasi dalam Pembangunan infrastruktur transportasi?
 - b. Bagaimana Sumberdaya dalam Pembangunan infrastruktur transportasi?
 - c. Bagaimana Disposisi dalam Pembangunan infrastruktur transportasi?
 - d. Bagaimana Struktur birokrasi dalam Pembangunan infrastruktur transportasi?

2. Implementasi kebijakan Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian.
 - a. Bagaimana Komunikasi dalam Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian?
 - b. Bagaimana Sumberdaya dalam Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian?
 - c. Bagaimana Disposisi dalam Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian?
 - d. Bagaimana Struktur birokrasi dalam Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian?

3. Implementasi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

- a. Bagaimana Komunikasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat?
- b. Bagaimana Sumberdaya dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat?
- c. Bagaimana Disposisi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat?
- d. Bagaimana Struktur birokrasi pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat?

DOKUMENTASI



(Wawancara Peneliti dengan Bapak Ryanto selaku Lurah Wonokerto Pada 27/11/2023)



(Wawancara Peneliti dengan Bapak Samijo selaku Carik Wonokerto Pada 30/11/2023)



Wawancara Peneliti dengan Bapak Eko selaku Ketua Kaur Perencanaan Wonokerto Pada 30/11/2023)



Wawancara Peneliti dengan Bapak Sutarjo selaku Ketua BPKal Wonokerto Pada 4/12/2023)



Wawancara Peneliti dengan Bapak Purwanto selaku Ketua LPMKal Wonokerto Pada 6/12/2023)



Wawancara Peneliti dengan Bapak Purwanto selaku Ketua LPMKal Wonokerto Pada 6/12/2023)



Wawancara Peneliti dengan Bapak Tri Hartono selaku Kepala Dukuh Mangunsari Pada
8/12/2023)



Wawancara Peneliti dengan Bapak Dalim selaku Ketua Kelompok Tani Wonokerto Pada
10/12/2023)



Foto perbikan jalur irigasi di Padukuhan Sempu Kalurahan Wonokerto 2/01/2024



Foto Kondisi Jalan Tani Kalurahan Wonokerto 2/01/2024